

ABSTRAK

Andrew Landl Widjaja (01656170139)

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PROPERTI TERHADAP AKTA PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI/PPJB YANG BERUPA KONTRAK BAKU/STANDARDIZED CONTRACT

(xv + 102 halaman, 1 gambar)

Perjanjian baku atau yang umum dikenal dengan istilah di dalam Bahasa Inggris dengan *standardized contract* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen dikarenakan penerapannya yang efektif dan efisien di dalam transaksi. Meskipun demikian, perjanjian baku juga membawa beberapa dampak negatif, khususnya bagi pihak konsumen yang posisi tawarnya lebih rendah daripada pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena isi dari perjanjian baku yang memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pelaku usaha, sehingga pihak konsumen tidak terlibat di dalam proses penyusunan klausul-klausul di dalam perjanjian baku tersebut. Didasari oleh hal inilah yang kemudian membuat Penulis ingin menganalisis lebih lanjut mengenai dampak penggunaan perjanjian baku, khususnya terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") yang umumnya selalu menggunakan bentuk perjanjian baku terhadap perlindungan konsumen. Dalam Tulisan ini, Penulis juga akan menganalisis hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan perjanjian baku dan juga kaitan perjanjian baku dengan asas keseimbangan para pihak di dalam sebuah perjanjian. Dimana dapat dilihat di dalam sebuah PPJB yang berbentuk baku, asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan para pihak dalam perjanjian sama-sama berlaku, tetapi saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Dimana pada asas kebebasan berkontrak, para pihak diberi kebebasan untuk membuat sebuah perjanjian, namun disisi lain berlaku pula asas keseimbangan yang memberikan batasan-batasan kepada kebebasan para pihak dalam membuat atau merumuskan sebuah perjanjian, sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan perlindungan konsumen yang menjadi salah satu pihak dalam PPJB yang berbentuk baku tersebut. Di dalam tulisan ini, Penulis memilih jenis penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan PPJB yang berbentuk perjanjian baku merupakan perjanjian yang didasari oleh asas kebebasan berkontrak dan telah memenuhi syarat-syarat keabsahan sebuah perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi agar dapat memenuhi aspek perlindungan hukum terhadap konsumen seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka asas kebebasan berkontrak harus dijalankan secara bertanggungjawab, yaitu dengan turut mempertimbangkan asas keseimbangan para pihak dalam sebuah perjanjian.

Referensi: 58 (1976-2018)

Kata Kunci: Perjanjian baku, asas kebebasan berkontrak, asas keseimbangan para pihak, perlindungan hukum konsumen

ABSTRACT

Andrew Landl Widjaja (01656170139)

PROPERTY CONSUMERS LAW PROTECTION UPON THE AGREEMENT BINDING FOR SALE AND PURCHASE/PPJB IN THE FORM OF STANDARDIZED AGREEMENT

(xv + 102 pages, 1 picture)

Standard agreements or commonly known as standardized contracts is one of many types of agreements that widely used in transactions between business actors and consumers due to its effective and efficient application in transactions between business actors and consumers. Nevertheless, standardized agreement also brings some negative impacts, especially for consumers whose bargaining position is lower than the business actor. This is because the contents of the standardized agreements that have been prepared in advance by business actors. Therefore, consumers are not involved in the drafting process of clauses within the standardized contract. In line with this issue, Author aims to analyze further regarding the impact of standardized agreements applications especially in a PPJB which generally used in the form of standardized agreements on consumers protection. In this thesis, Author will also analyze the relationship between the freedom of contract principle with the standardized agreements and the relationship between standardized agreements with equality principle. Whereas, it can be seen in standardized PPJB, the freedom of contract principle and equality principle are both valid and applicable, but contradictory to each other. Where in the freedom of contract principle, parties have a freedom to make an agreement, however, on the other hand there is also equality principle applies which give some limitations to the freedom of parties in drafting or formulating the agreement. Thus, both directly and indirectly related to the protection of consumers as one of parties in PPJB. In this thesis, Author chooses the normative legal research, with data sources obtained from literature studies. The result of this research, it can be concluded that the standardized PPJB is an agreement based on the freedom of contract principle and has fulfilled the conditions of the validity of an agreement in accordance with the provision of Article 1320 of the Civil Code. However, in order to meet the aspects of legal protection for consumers as stipulated in Law No. 08 of 1999 concerning Consumer protection, freedom of contract principle must be carried out responsibly, by considering the equality principle in an agreement.

Reference: 58 (1976-2018)

Key words: Standardized agreement, freedom of contract principle, equality principle, consumers protection.